



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER
DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL II
DAFTAR GAMBAR III
KATA PENGANTAR IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5
1.2 Isu-isu Strategis 7
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 8
1.4 Sistematika Penulisan 12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 20xx 14
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD..... 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 202520
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....21
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi32
3.2 Realisasi Anggaran59

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan62
4.2 Rekomendasi.....63

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
RKT / Lain2 yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	8
Tabel 1.2	: Sarana dan Prasarana Penunjang tahun 2025.....	13
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2021-2026....	16
Tabel 2.2	: Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2025-2029....	17
Tabel 2.3	: Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2025.....	18
Tabel 2.4	: Struktur Program Dan Kegiatan.....	20
Tabel 2.5	: Penetapan Perjanjian Kinerja 2025.....	22
Tabel 2.6	: Rincian Program dan Kegiatan Dinkop UKM dan Naker.....	22
Tabel 2.7	: Perubahan Perjanjian Kinerja 2025.....	26
Tabel 2.8	: Perubahan Rincian Program dan Kegiatan.....	27
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	32
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama 2025.....	20
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Organisasi Penetapan PK 2025.....	34
Tabel 3.4	: Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	36
Tabel 3.5	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	41
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	43
Tabel 3.7	: Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	46
Tabel 3.8	: Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	50
Tabel 3.9	: Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	53
Tabel 3.10	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi	11
Gambar 2.1 : SIGAP (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan)	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra dan renja (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2025 – 2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kajen, 3 Februari 2026

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WINDO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Sehubungan hal dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memegang prinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit kerja pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan sumber daya yang digunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LKjIP juga berfungsi untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan

perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Sedangkan fungsinya antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan Menengah, bidang tenaga kerja dan transigrasi.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Tenaga Kerja dan transmigrasi
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tersebut mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Guna mewujudkan pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sebagai dokumen awal, yang kemudian mengalami perubahan, seperti Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2025 tentang perubahan RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Renja 2025 serta dokumen Renstra 2025 – 2029 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, adapun

tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan yaitu Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan.
2. Sedangkan Sasaran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan yaitu :
 - 1) Meningkatnya Koperasi Aktif KSP/USP Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro
 - 3) Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja
 - 4) eningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan
 - 5) Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan.

Laporan kinerja disusun sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penyajian pelaporan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja, tingkat capaian tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan peningkatan pencapaian kinerja yang merupakan gambaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025.

1.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029

dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, terdapat satu (1) isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Dukungan SDM

Jumlah PNS dan P3K Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebanyak 35 Pegawai Negeri Sipil, 3 P3K Penuh Waktu, dan 17 P3K Paruh Waktu. (data PNS dan P3K per Desember 2025). Berdasar Golongan terdiri dari Golongan II sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 30 orang, dan Golongan IV sebanyak 3 orang. Jumlah penjabat Struktural sebanyak 7 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 22 orang, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 16 orang.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja
Kab. Pekalongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	2
2	Golongan III	30
3	Golongan IV	3

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
6. UPT.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

2. Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan serta Pengawasan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

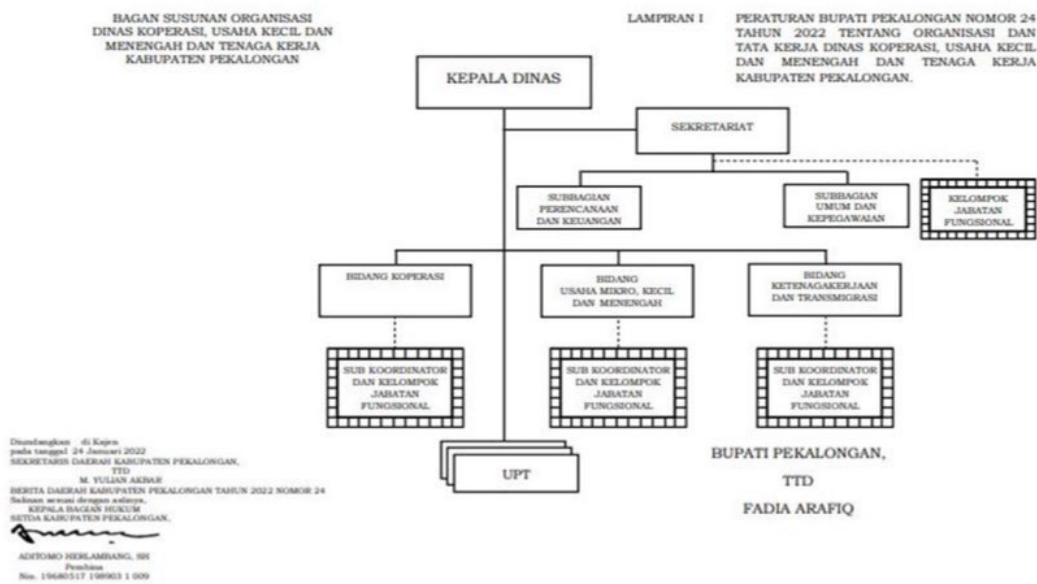
Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi serta Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penempatan, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; Perluasan
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial serta Kelembagaan Hubungan Industrial dan Penanganan Perselisihan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPT



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan**

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Penunjang tahun 2025

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Peralatan dan Mesin	Unit	100	60	160
2	Gedung dan Bangunan	Unit	5	4	9
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Unit	1	-	1
4	Aset tetap lainnya	Unit	107	28	135
JUMLAH			213	92	305

c. Dukungan anggaran

Pada Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 10 program, 19 kegiatan yang didukung oleh APBD sejumlah Rp. 10.513.142.343. Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan anggaran ini menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sekaligus memperkuat peran Kecamatan karangdadap sebagai perangkat daerah yang berorientasi pada hasil dan capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Memuat latar belakang dibentuknya Instansi
- 1.2 Isu-Isu Strategis
Menguraikan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi. Menyajikan factor lingkungan, baik factor didalam maupun diluar Organisasi yang memiliki pengaruh pada kemampuan Organisasi dalam mencapai tujuan
- 1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
Memuat sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025
- 1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berisi tindak lanjut dari rekomendasi/saran LKjIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya tahun 2025 – 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
Berisi Program dan kegiatan OPD
- 2.4 Perjanjian Kinerja
Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Menyajikan instrumen – instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti aplikasi yang digunakan di lingkup Pemda, aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh OPD, aplikasi dari Kementerian yang digunakan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja
- 3.3 Inovasi
Menyajikan inovasi yang dimiliki
- 3.4 Penghargaan
Menyajikan penghargaan baik tingkat regional maupun nasional

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
- B. REKOMENDASI
Menampilkan langkah perbaikan yang akan dilakukan organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Belum Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;	Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan semua Sub Komponen yang masih mendapatkan nilai dibawah level B sebagaimana yang tercantum pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2.	Belum Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan LKjIP ditahun yang akan datang;
3.	Ukuran Keberhasilan Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART;	Melakukan pemenuhan data dukung yang diperlukan/ dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.
4.	Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	
5.	Setiap pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitment dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;	
6.	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;	
7.	Pengukuran kinerja belum dapat mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;	
8.	Pengukuran kinerja belum dapat mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;	
9.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;	
10.	Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;	
11.	Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;	
12.	Dokumen Laporan Kinerja belum direviu;	
13.	Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu;	
14.	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.	

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan dan Pembahasan Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tanggal 24 Juni 2025, rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi yang harus ditindakjuti. Namun demikian sampai dengan pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2024, masih terdapat rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti sebanyak 6 (enam) rekomendasi yaitu:

1. Melakukan penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis atau evaluasi kinerja sebelumnya;
2. Melengkapi dokumen IKU dengan menambah definisi operasional yang relevan;
3. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang;
4. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi dan kebijakan serta aktifitas kinerja dan penetapan anggaran;
5. Mereviu dokumen Laporan Kinerja secara berjenjang; dan
6. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja tepat waktu,

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Pada tahun 2025 ini merupakan masa peralihan, dimana terdapat perubahan dokumen perencanaan strategis (Renstra) sehingga dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025. Adapun table tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2021-2026

- 1. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong
- 2. Misi : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal
- 3. Tujuan & Sasaran (contoh table).

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kesempatan kerja dan Meningkatkan koperasi aktif dan usaha mikro			persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,54	20,00	22,00	24,00	26,00
				Pertumbuhan Koperasi Aktif dan Usaha Mikro	4,24	5,32	5,42	5,64	5,83
		1.1	Meningkatnya Kesediaan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	57,1	50	50	50	64
				Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	20	20	20	20	40
		1.2	Meningkatnya koperasi dan usaha mikro	Pertumbuhan koperasi Aktif	4,76	5,00	5,24	5,43	5,58
				Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	0,52	0,32	0,18	0,21	0,25

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2025 - 2029

- 1. Visi : Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, dan Sejahtera
- 2. Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UKM yang berdaya saing
- 3. Tujuan & Sasaran (contoh table).

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan		1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		1,18	1,44	1,71	1,97	2,23
			2. Rasio Kewirausahaan Daerah		4,66	5,03	5,40	5,77	6,14
			3. Rasio Produktivitas Tenaga Kerja		52,61	52,65	52,70	52,75	52,80
			4. Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan		100	100	100	100	100
		1.1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65	0,54	0,72	0,90	1,07
		1.2	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32	9,46	9,51	9,70	9,84
		1.3	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89	71,07	71,26	71,46	71,67
		1.4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100	100	100	100	100

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang yang harus diwujudkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO RKINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,18
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,66
			Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio	52,61
			Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	%	100
		1.1 Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	237,65
		1.2 Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	%	9,32
		1.3 Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,89

		1.4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	%	100
--	--	---	--	---	-----

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Meningkatkan Koperasi	Meningkatkan permodalan koperasi simpan pinjam dalam rangka pengembangan usaha koperasi, manajemen usaha dan keuangan koperasi
			Memperkuat sistem pangan melalui koperasi sektor rill
			Meningkatkan pengembangan SDM Koperasi melalui pelatihan dan pendidikan perkoperasian
			Meningkatkan pengembangan SDM koperasi melalui incubator bisnis pada koperasi baik KSP / Koperasi Sektoril
			Meningkatkan SDM koperasi khususnya perempuan melalui pengembangan perkoperasian
2.	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro	Meningkatkan kapasitas SDM, dan Standar mutu produk serta pengembangan Inovasi bagi Pelaku UMKM Batik
			Meningkatkan pendapatan UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan kewirausahaan dan pembinaan koperasi
			Meningkatkan akses pemasaran usaha mikro melalui kegiatan bazaar, Expo dan Pengembangan Jaringan kemitraan UMKM.
			Memberikan Fasilitas Pelatihan kepada Usaha Mikro dibidang Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
3.	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Meningkatkan proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Pembentukan forum komunikasi antara BLK dengan Perusahaan (FKLPID) dalam rangka kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional.
			Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja, meningkatkan keterampilan lulusan untuk lebih siap menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri.
			Penyelarasan antara dunia usaha, dunia industri dunia kerja (DUDIKA) melalui pembinaan terhadap bursa kerja khusus (BKK) di SMK/SMA dan Universitas.
			Penyediaan layanan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten pekalongan (SIGAP) untuk pendaftaran kartu pencari kerja dan penyebarluasan informasi pasar kerja serta penyelenggaraan pameran bursa kerja (<i>Job Fair</i>)
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran
			Fasilitasi Pelatihan bagi calon transmigran
5.	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Meningkatkan tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Meningkatkan disiplin kerja, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta transparansi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program Dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
4.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
5.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
6.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
6.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
6.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
7.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
8.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
9.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
10.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 seperti pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Penetapan Perjanjian Kinerja 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kesediaan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	64	%
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	40	%
2.	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentasi Pertumbuhan koperasi aktif	5,58	%
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	0,25	%

Pada Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 10 program, 19 kegiatan yang didukung oleh APBD sejumlah Rp. 10.513.142.343,- (Sepuluh Miliar Limaratus Tigabelas Juta Seratus Empatpuluh Dua Ribu Tigaratus Empatpuluh Tiga rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rincian Program dan Kegiatan
Dinkop UKM dan Naker

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	100 %	56.000.000
	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	50 koperasi	56.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kabupaten/ Kota			
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	55 %	534.200.000
	Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai, Tambah, Memeiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Resturisasi Usaha	50 koperasi	534.200.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,023 %	1.398.021.343
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan melalui kemitraan	250 Unit Usaha	659.000.000
		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	415 Unit Usaha	36.900.000
		Jumlah jenis Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan melalui peningkatan kelembagaan	215 Unit Usaha	510.000.000
		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan melalui pelatihan	140 Orang	192.121.343
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	55 %	78.500.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	385 Unit Usaha	38.500.000
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapat Fasilitasi, produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	40.000.000
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	15.000.000
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	15.000.000
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %	1.648.600.000
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi	288 Orang	1.568.600.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi pencari kerja bagi klaster kompetensi	150 Orang	40.000.000
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Kerja Swasta yang dibina	28 Lembaga	15.000.000
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi ke Produktivitas Perusahaan kecil	20 Perusahaan	25.000.000
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %	110.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Online	3500 Orang	35.000.000
		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	75.000.000
	Kegiatan Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang ditangani sesuai prosedur LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	50 Orang	10.000.000
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %	34.350.000
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HI	10 Perusahaan	15.000.000
		Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB), Struktur skala upah, dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan	10 Perusahaan	19.350.000
	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	8 Perkara	20.000.000
		Jumlah LKS tripartite yan dibina	3 Sidang Lembaga	15.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Jamsostek dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	170.000.000
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %	75.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigrasi yang diberangkatkan	1 KK	75.000.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.563.471.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncaanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000
		Jumlah Dokumen, Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	12 bln Laporan	7.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bln Orang/bulan	4.708.471.000
		Jumlah Bulan Terpenuhinya Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	12 Dokumen	85.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	9.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 Paket	10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bln Paket	56.000.000
		Jumlah terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 bln Paket	30.000.000
		Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bln Paket	75.000.000
		Jumah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	7.000.000
		Jumlah Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD	12 bln Laporan	65.000.000
		Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis pada OPD	12 dokumen	5.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	168.000.000
		Jumlah Pengadaan Jasa Pelayan Umum	12 Laporan	1.105.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan Unit	35.000.000
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	12 bulan Unit	60.000.000
		Jumlah Bulan Terpenuhinya	12 bln Unit	55.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 bln Unit	76.000.000

Tahun 2025 merupakan periode masa transisi dan adanya perubahan dokumen rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 sehingga dilakukan penyesuaian perjanjian kinerja, adapun perubahan itu memuat tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Tujuan				
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,18	%
		Rasio Kewirausahaan Daerah	4,66	%
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	52,61	%
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100	%
Sasaran				
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65	%
2.	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32	%
3.	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89	%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100	%
5.	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65	%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,99	%

Pada Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 10 program, 19 kegiatan yang didukung oleh APBD sejumlah Rp. 11.967.145.801,- (Sebelas Miliar Sembilanratus Enampuluh Tujuh Juta Seratus Empatpuluh Lima Ribu Delapanratus Satu rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Perubahan Rincian Program dan Kegiatan
Dinkop UKM dan Naker

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Koperasi	100 %	42.586.700
	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90%-100% Unit Usaha	42.586.700
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	55 %	857.947.540
	Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	90%-100% Unit Usaha	857.947.540
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,023 %	1.737.187.171
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	678.554.800
		Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	177.469.700
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	215 Unit Usaha	534.774.500

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Usaha Mikro		
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	346.388.171
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	55 %	415.102.150
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	385 Unit Usaha	283.555.200
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	131.546.950
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	23.564.500
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	23.564.500
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %	1.664.981.120
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	1.618.600.000
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun nbagi klaster kompetensi	150 Orang	15.540.150
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 Lembaga	10.533.080
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20.307.890
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %	99.537.120
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	3500 Orang	25.000.000
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa	300 Orang	67.078.320

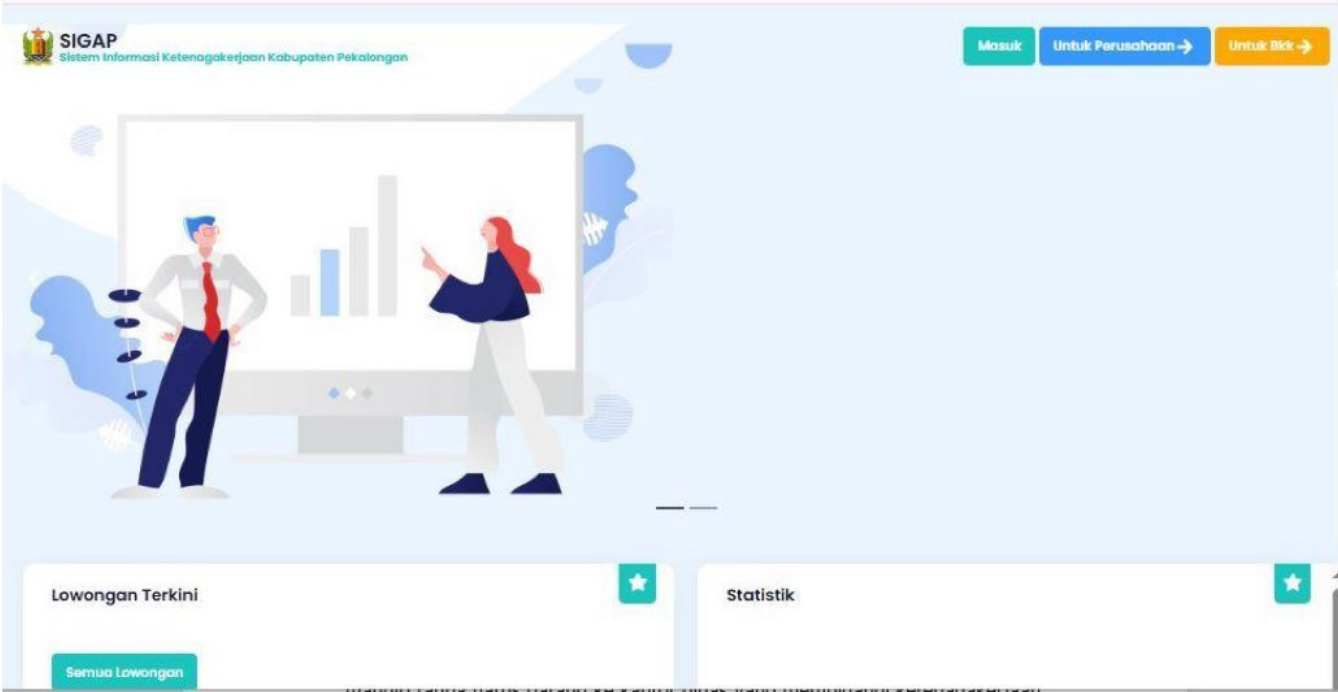
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Kerja		
	Kegiatan Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	7.458.800
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %	316.145.650
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	10.082.450
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	11.827.000
	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	8 Perkara	113.447.200
		Jumlah LKS tripartite yang dibina	3 Sidang Lembaga	10.789.000
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	170.000.000
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %	72.977.830
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	1 KK	72.977.830
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.737.116.020
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.613.160
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bln Laporan	5.321.700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bln Orang/bulan	4.789.846.000
		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	83.956.880

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4.518.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.994.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bln Paket	53.518.840
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bln Paket	30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bln Paket	74.648.800
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	5.791.440
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln Laporan	41.652.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.275.520
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.625.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.117.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan Unit	34.995.200
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	59.997.400
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bln Unit	54.961.480
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 bln Unit	175.400.000

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Penerapan Aplikasi SIGAP guna menunjang pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1). Dengan menggunakan Aplikasi SIGAP memudahkan para pencari kerja untuk membuat dan mencetak Kartu Pencari Kerja (AK1) secara mandiri tanpa harus datang ke kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Gambar 2.1
SIGAP (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan)



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi dokumen perencanaan dimana untuk Perjanjian kinerja penetapan tahun 2025 disesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 disesuaikan dengan sehingga ada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. hal itu tidak hanya terjadi perubahan anggaran namun juga perubahan tujuan dan sasaran dan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja yang akan dicapai Tahun 2025.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, dan perjanjian kinerja (PK) maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
1.	Lebih dari 100%	Istimewa
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4.	≥20 – 60%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja Utama

=

Target - (Realisasi -Target)

Target

x 100%

Atau

Capaian Indikator Kinerja Utama

=

(2x Target) - Realisasi

Target

x 100%

1. Rata – rata Capaian Kinerja Utama

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2025, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah. Pengukuran Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sebelum melakukan analisa terhadap sasaran strategis yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan berikut uraian capaian kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2025
(Renstra 2025 – 2029)

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target	Realisa si	Capaian (%)	Kategori	Sumber data
1.	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,18 %	0,89 %	75,42 %	Butuh Perbaikan	Bidang Koperasi
		Rasio Kewirausahaan Daerah	4,66 %	9,7%	207%	Istimewa	Bidang UMKM

dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	52,61 %	51,52 %	98 %	Baik	BPS
	Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %	Baik	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Rata-rata				120,105 %	Istimewa	

2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian organisasi pada Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan akan disajikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja baik penetapan maupun Perubahan di Tahun 2025, namun demikian capaian kinerja akan disampaikan secara detail dan mendalam pada capaian perubahan perjanjian kinerja 2025 yang merupakan bagian dari capaian indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian akan disajikan analisa capaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Organisasi Penetapan PK 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kediaan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	64	66,08	103,25
		Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	40	100	250
2.	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentasi Pertumbuhan koperasi aktif	5,58	18,87	338,17
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	0,25	11,28	4.512
	Rata-rata				1.300,85

Sumber : Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan

Dari tabel diatas nampak bahwa capaian kinerja berhasil menunjukan capaian sebesar 1.300,85% atau tercapai dengan **kategori Istimewa** capaian kinerja tahun 2025 merupakan capaian akhir dari dokumen perencanaan 2021-2026.

- Pada indikator Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan tercapai prosentase capaian kinerja sebesar 103,25% dari target 64% dan realisasi 66,08% tercapai dengan kriteria Istimewa, tahun 2025 jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 460 orang, dan jumlah pendaftar yang mendapat pelatihan sejumlah 304 orang.
- Pada indikator Persentase calon transmigran yang diberangkatkan capaian kinerja sebesar 250% dari target 40%, adapun realisasi tahun 2025 sebesar 100%, perhitungan Jumlah Transmigran yang Berhasil Diberangkatkan dibagi Target/Kuota Transmigrasi yang Ditetapkan dikali 100. Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan telah mengirimkan calon transmigrasi sejumlah 1 KK. Ditempatkan diwilayah transmigrasi yaitu Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Capaian ini didukung oleh program pemerintah Kabupaten Pekalongan pada OPD yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran, adapun Alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 19 KK, Dimana untuk Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sejumlah 1 KK.
- Pada indikator Prosentase Pertumbuhan koperasi aktif dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 7,59% sehingga capaian kinerja sebesar 136% dari target 5,58%. Pada tahun 2025 jumlah koperasi aktif sebanyak 170 koperasi. Jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan sebanyak 602 koperasi. Jumlah penambahan koperasi aktif (baru) pada tahun 2025 sebanyak 12 koperasi dalam bentuk lainnya dan ada sebanyak 285 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah berbadan hukum namun belum menjalankan operasional usaha. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini yaitu Regulasi yang mendukung kemudahan pendirian koperasi, Program pembinaan, pelatihan dan pendampingan serta pengawasan dari pemerintah, Meningkatkan akses kemitraan dalam lingkup usaha koperasi dan Stimulus permodalan. Adapun 432 koperasi tidak aktif.

Koperasi dengan status tidak aktif dikarenakan ketidakpatuhan administratif yaitu tidak melaksanakan RAT selama 2-3 tahun berturut-turut, Tidak ada kegiatan operasional usaha, tidak ada transaksi, lemahnya manajemen yaitu pengurus tidak aktif atau tidak kompeten dan anggota pasif serta minimnya akses kemitraaan dan permodalan. Dalam hal ini Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sudah melakukan Sosialisasi terkait regulasi yang mendukung kemudahan pendirian koperasi, Melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan serta pengawasan terhadap koperasi melalui proses revitalisasi atau pengaktifan kembali koperasi yang tidak aktif, Meningkatkan akses kemitraan dalam lingkup usaha koperasi, Meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perkoperasian, juga dilakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 50 Koperasi dan untuk pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebanyak 50 Koperasi.

- Pada indikator Prosentase pertumbuhan usaha mikro capaian kinerja sebesar 4.512% dari target 0,25%, adapun realisasi tahun 2025 sebesar 11,28%. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pelaku-pelaku usaha mikro baru didaerah. Pada tahun 2025 jumlah usaha mikro baru sebanyak 10.198 Unit Usaha sesuai dengan data NIB (Nomor Induk Berusaha). Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini yaitu Faktor Pendataan, Faktor Kemitraan (Integrasi Rantai Pasok), Faktor Kemudahan Perizinan, Faktor Penguatan Kelembagaan, Faktor Koordinasi Pemangku Kepentingan, Pemberdayaan yang berhasil memerlukan keterlibatan banyak pihak agar tidak terjadi tumpang tindih program. Namun Masih banyak usaha mikro yang belum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)), sehingga kami tidak mengetahui jumlah semua usaha mikro secara rill di Kabupaten Pekalongan Dalam hal ini Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sudah memberikan sosialisasi dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada usaha mikro.

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN							
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,18 %	0,89 %	75,42 %	Butuh Perbaikan	Bidang Koperasi
		Rasio Kewirausahaan Daerah	4,66 %	9,7%	207%	Istimewa	Bidang UMKM
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	52,61 %	51,52 %	98 %	Baik	BPS
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %	Baik	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Rata - rata		120,105 %			Istimewa	
SASARAN							
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65 %	187,97 %	79,09 %	Butuh Perbaikan	Bidang Koperasi
2.	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32 %	11,28 %	121 %	Istimewa	Bidang UMKM
3.	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89 %	72,15 %	102 %	Istimewa	BPS
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %	Baik	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5.	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 %	63,65 %	97,92 %	Baik	Bidang Sekretariat
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,99 %	86,87 %	98,72 %	Baik	Bidang Sekretariat
	Rata - rata		94,81 %			Baik	

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (Satu) Tujuan dengan 4 (Empat) indikator, indikator tujuan masuk dalam kategori Istimewa dimana capaiannya 130,75 %, begitu pula dengan sasaran dari total 6 (Enam) indikator sasaran capaiannya 94,81 % masuk dalam kategori Baik, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan rata-rata realisasi capaiannya dikategorikan **BAIK**.

1. Pada indikator tujuan

- a. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB capaian kinerja tercapai sebesar 75,42% tercapai dengan kategori Butuh Perbaikan. Sesuai dengan data PDRB (ADHB) dari BPS tahun 2024 karena PDRB (ADHB) tahun 2025 belum dirilis, pada tahun 2025 realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 0,89%. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Volume Usaha Koperasi Daerah dibagi PDRB (ADHB) tahun 2024 dikali 100%.
- b. Rasio Kewirausahaan Daerah capaian kinerja tercapai sebesar 207% tercapai dengan kategori istimewa. Pada tahun 2025 realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 9,7% artinya Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Jumlah Wirausaha di Daerah dibagi Populasi Penduduk di Daerah dikali 100%. Adapun jumlah wirausaha di daerah pada tahun 2025 sebanyak 100.588 dan jumlah populasi penduduk sebanyak 1.039.736 jiwa.
- c. Rasio Produktivitas Tenaga Kerja capaian kinerja tercapai sebesar 98% tercapai dengan kategori Baik. Pada tahun 2025 realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 51,52% artinya Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan PDRB Riil dibagi Jumlah Penduduk yang Bekerja.
- d. Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan capaian kinerja tercapai sebesar 100% tercapai dengan kategori Baik. Pada tahun 2025 realisasi Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan sebesar 100% artinya Jumlah Transmigran yang Berhasil Diberangkatkan dibagi Target/Kuota Transmigrasi yang Ditetapkan dikali 100%.

2. Pada indikator sasaran

- a. Prosentase koperasi aktif

Realisasi kinerja pada indikator prosentase koperasi Aktif sebesar 187,97 % dari target 237,65%. Pada tahun 2025 jumlah koperasi aktif sebanyak 455 jumlah keseluruhan koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan sebanyak 886 jumlah koperasi aktif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 591 namun masih ada

431 koperasi tidak aktif. Koperasi tidak aktif dikarenakan keberadaan Koperasi sudah tidak ada, pengurus sudah tidak aktif, tidak melakukan RAT sebagai kewajiban Koperasi. namun demikian kita selalu melakukan pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif agar bisa aktif kembali, kegiatan yang dilaksanakan terhadap koperasi yang aktif memberikan Pengawasan dan Pelatihan terhadap Pengurus Koperasi maupun Pengawas Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perkoperasian, juga dilakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi untuk Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 50 Koperasi dan untuk pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebanyak 50 Koperasi.

b. Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro

Realisasi Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) sebesar 11,28 % dari target 9,32%. Pada tahun 2025. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Jumlah Wirausaha di Daerah dibagi Populasi Penduduk di Daerah dikali 100%.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK didasarkan menurut usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, dari perkiraan TPAK di Kabupaten Pekalongan periode tahun 2025 secara umum mengalami kenaikan 2% dari target TPAK tahun 2025 pada angka 70,89% menjadi 72,15%. Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain golongan usia mulai umur 25 tahun ke atas sebagian besar telah memiliki tanggungjawab ekonomi baik untuk keluarga maupun untuk kehidupannya secara mandiri, sehingga aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu TPAK golongan umur 40–44 tahun diperkirakan menjadi kelompok yang terbesar nilai TPAK nya dibandingkan golongan umur lainnya.

Selanjutnya dari tingkat pendidikan TPAK lulusan Sarjana atau Perguruan Tinggi merupakan TPAK dengan nilai paling tinggi dibanding dengan jenjang pendidikan lainnya.

TPAK yang dipengaruhi oleh jenis kelamin dilihat dari jumlah Angkatan Kerja laki-laki yang lebih banyak daripada jumlah Angkatan Kerja perempuan walaupun apabila dilihat dari data Penduduk Usia Kerja (PUK) jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah PUK Laki-laki, hal tersebut terjadi disebabkan beberapa hal yaitu antara lain karena laki-laki merupakan kepala keluarga yang harus menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga dan perempuan yang berstatus sudah menikah dan mengurus rumah tangga memang salah satu yang membuat jumlah TPAK-nya lebih sedikit dari jumlah TPAK Laki-laki.

d. Presentase transmigran yang diberangkatkan

Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan telah mengirimkan calon transmigrasi sejumlah 1 KK. Ditempatkan di wilayah transmigrasi yaitu Desa Taramanu Tua Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Capaian ini didukung oleh program pemerintah Kabupaten Pekalongan pada OPD yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran, adapun Alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 19 KK, Dimana untuk Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sejumlah 1 KK.

e. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 97,92 %. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor: 700.1.2/1.5/EV.SAKIP/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebagai langkah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja adalah perencanaan kinerja yang berkualitas, pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan kinerja yang sesuai standard, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

f. Nilai IKM Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM dan Naker indikator kinerja tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai dengan realisasi sebesar 86,87 % Survei kepuasan masyarakat diberikan kepada pengguna layanan di Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 396 responden. Hasil survei kepuasan masyarakat di Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan diperoleh dari perhitungan Formulasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persepsi 9 unsur pelayanan yaitu:

- Persyaratan pelayanan
- Prosedur pelayanan

- Waktu penyelesaian pelayanan
- Biaya pelayanan
- Hasil pelayanan
- Kemampuan petugas
- Sikap petugas
- Sarana prasana pelayanan
- Sarana pengaduan

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	202n-2			202n-1			202n		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUJUAN											
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		0,70 %			0,94%		1,18 %	0,89 %	75,42 %
		Rasio Kewirausahaan Daerah		n/a			n/a		4,66 %	9,7 %	207 %
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja		n/a			n/a		52,61 %	51,52 %	98 %
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	20%	0	0	20%	20%	100%	100 %	100 %	100 %
SASARAN											
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	5,24%	15,4 %	293,8 %	5,43%	3,94%	73%	237,65 %	187,97 %	79,09 %
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	0,18%	0,18 %	100%	0,21%	0,21%	100%	9,32 %	11,28 %	121%
	Meningkatnya proporsi	Tingkat							70,89 %	72,15 %	102 %

	penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)										
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	20%	0	0	20%	20%	100%	100 %	100 %	100 %	
	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah					63,10 %		65 %	63,65 %	97,92 %	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	80%	85,1 %	106,3 %	83%	86,98 %	104%	87,99 %	86,87 %	98,72 %	

1. Indikator Tujuan

- Pada indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB capaian kinerja tercapai sebesar 75,42% tercapai dengan kategori Butuh Perbaikan. Sesuai dengan data PDRB (ADHB) dari BPS tahun 2024 karena PDRB (ADHB) tahun 2025 belum dirilis, pada tahun 2025 realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 0,89%. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Volume Usaha Koperasi Daerah dibagi PDRB (ADHB) tahun 2024 dikali 100%. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,05%, sehingga perlu adanya perbaikan agar dapat sesuai target yang sudah diperjanjikan yaitu dengan kategori Baik.
- Pada indikator Rasio Kewirausahaan Daerah capaian kinerja tercapai sebesar 207% dengan realisasi 9,7% dari target 4,66%. Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak ada nilai pembanding dari tahun sebelumnya.
- Pada indikator Rasio Produktivitas Tenaga Kerja capaian kinerja tercapai sebesar 98% dengan realisasi 51,52% dari target 52,61%. Sesuai dengan data dari BPS.
- Pada indikator Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% tercapai dengan kategori Baik. Pada tahun 2025 realisasi Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan sebesar 100% artinya Jumlah Transmigran yang Berhasil Diberangkatkan dibagi Target/Kuota Transmigrasi yang Ditetapkan dikali 100%. Pada tahun 2022 diberikan kuota transmigrasi satu KK, Pada tahun 2023 tidak mendapatkan kuota transmigrasi dan pada tahun 2024 mendapatkan Kuota Transmigrasi sebanyak satu KK.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,89 %	2,23 %	39,91 %
		Rasio Kewirausahaan Daerah	9,7 %	6,14 %	157,98 %
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	51,52 %	52,80 %	97,57 %
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %
	Rata - rata				98,86 %
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	187,97 %	1,07 %	17.567 %
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	11,28 %	9,84 %	114,63 %
	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,15 %	71,67 %	100,66 %
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	63,65 %	78,00 %	81,60 %
		Nilai IKM Perangkat Daerah	86,87 %	94,87 %	91,56 %
	Rata - rata				3.009 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, realisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra rata-rata tingkat capaiannya sudah **98,86 %**.

1. Indikator Tujuan

- Pada Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 39,91%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB yang lebih tinggi.
- Pada Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 157,98%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang sangat baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target Rasio Kewirausahaan Daerah yang lebih tinggi.
- Pada Indikator Rasio Produktivitas Tenaga Kerja realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 97,57%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target Rasio Produktivitas Tenaga Kerja yang lebih tinggi.
- Pada Indikator Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan yang lebih tinggi.

2. Indikator Sasaran

- Pada indikator Persentase Koperasi Aktif realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 17.567%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan adanya pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun ini sehingga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap capaian Persentase Koperasi Aktif.

- Pada indikator Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 114,63%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- Pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100,66%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- Pada indikator Presentase transmigran yang diberangkatkan realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik.
- Pada indikator Nilai SAKIP realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 81,60% Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target nilai SAKIP yang lebih tinggi.
- Pada indikator Nilai IKM realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Rensta menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 91,56% Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target nilai IKM yang lebih tinggi.

Tabel 3.7

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
TUJUAN					
1.	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,18 %	1,40 %	118 %
		Rasio Kewirausahaan Daerah	4,66 %	9,7%	207%
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	52,61 %	51,52 %	98 %
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %
Rata - rata					130,75 %
SASARAN					
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65 %	187,97 %	79,09 %
2.	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32 %	11,28 %	121 %
3.	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89 %	72,15 %	102 %
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	100 %
5.	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 %	63,65 %	97,92 %
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,99 %	86,87 %	98,72 %
Rata - rata					94,81 %

Dari tabel diatas nampak bahwa pada indkator kinerja tujuan menunjukan **keberhasilan** capaian dengan rata - rata capaian kinerja sebesar **130,75%**. Sedangkan pada indkator kinerja sasaran menunjukan **keberhasilan** capaian dengan rata - rata capaian kinerja sebesar **94,81%**. Analisis Keberhasilan/Kegagalan (upaya – upaya) yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

1. Indikator Tujuan

- Pada Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tercapai sebesar 118% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah karena penambahan Koperasi aktif. Solusi atas hambatan tersebut adalah pembinaan dan pengawasan secara intensif dan sering terjadi perubahan aturan perundang – undangan Koperasi.
- Pada Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah tercapai sebesar 207% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah meningkatnya jumlah wirausaha yang ada di daerah.
- Pada Indikator Rasio Produktivitas Tenaga Kerja tercapai sebesar 98% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah karena tersedianya banyak pilihan kejuruan, selain itu ada hambatan antara lain kelas pelatihan kurang layak, Sarana prasarana peralatan pelatihan sudah usang dan banyak yang rusak, jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas kelas pelatihan. Solusi atas hambatan tersebut adalah pemeliharaan / pembangunan gedung, pembaharuan peralatan pelatihan, penambahan anggaran pelatihan agar paket pelatihan meningkat sehingga jumlah peserta yang ikut pelatihan bertambah.
- Pada Indikator Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan tercapai sebesar 100% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah Animo masyarakat terhadap transmigrasi, dukungan anggaran dari pemerintah, penyiapan lokasi strategis dan produktif yang sudah dilengkapi dengan Fasilitas umum, selain itu juga ada hambatan pencapaian target kinerja antara lain kuota transmigrasi terbatas, informasi terkait adanya kuota transmigrasi minim Solusi atas hambatan tersebut adalah penambahan kuota transmigrasi, informasi akan pemberangkatan transmigrasi disampaikan lebih awal, penambahan sasaran daerah sosialisasi transmigrasi.

2. Indikator Sasaran

- Pada Indikator Persentase Koperasi Aktif tercapai sebesar 79,09% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan Solusi atas hambatan tersebut adalah anggaran belum maksimal.
- Pada Indikator Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro tercapai sebesar 121% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah Meningkatnya jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha.

- Pada Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercapai sebesar 102% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah tingkat pendidikan, tingkat partisipasi perempuan, jumlah penduduk usia kerja, urbanisasi dan kesempatan kerja. Adapun hambatannya adalah tingginya angka putus sekolah, tingkat kemiskinan, mutu dan keterampilan kerja rendah, keterbatasan lapangan kerja. Solusi atas hambatan tersebut adalah penanganan anak tidak sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang baik, meningkatkan iklim investasi.
- Pada Indikator Presentase transmigran yang diberangkatkan tercapai sebesar 100% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah kuota transmigrasi terbatas, animo masyarakat kecil Solusi atas hambatan tersebut adalah permohonan penambahan kuota transmigrasi, memperbanyak sasaran sosialisasi transmigrasi guna meningkatkan animo masyarakat.
- Pada Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah tercapai sebesar 97,92% Faktor pendukung pencapaian target kinerja adalah perencanaan kinerja yang berkualitas, pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan kinerja yang sesuai standard, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah konsistensi dalam pengumpulan data kinerja. Solusi atas hambatan tersebut adalah membuat jadwal pengumpulan data kinerja agar data bisa terkumpul dan diolah secara tepat waktu.
- Pada Indikator Nilai IKM Perangkat Daerah tercapai sebesar 98,72% Faktor pendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat dari 4 indikator yang memiliki nilai IKM tertinggi yaitu :
 1. Kewajaran tarif/biaya pelayanan yang transparan dan sesuai ketentuan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat
 2. Kesopanan dan perilaku petugas yang ramah serta professional dalam memberikan pelayanan
 3. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan secara tepat dan sesuai prosedur
 4. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian target kinerja tersebut adalah :

- a. Kualitas sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (fasilitas umum dan area parkir kurang tertata)
- b. Penanganan pengaduan layanan yang belum optimal
- c. Jangka waktu pelayanan yang pada kondisi tertentu masih kurang optimal
- d. Kurangnya perawatan bangunan / ruangan kelas
- e. Media social belum aktif dalam memberikan informasi pelayanan

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Rendahnya Sarana dan Prasarana dalam hal pelayanan masih dirasakan oleh masyarakat.
- b. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Sedangkan solusi atas hambatan yang dapat dilakukan adalah

- a. Melakukan peningkatan dan penataan sarana prasarana termasuk perbaikan fasilitas umum dan parkir
- b. Meningkatkan system penanganan pengaduan agar lebih cepat dan responsif
- c. Melakukan evaluasi dan penyederhanaan alur pelayanan guna mempercepat waktu penyesuaian
- d. Melaksanakan perawatan rutin gedung / ruangan pelayanan
Mengkatifkan kembali media social resmi untuk update informasi, sosialisasi prosedur.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebanyak Rp. 11.967.145.801,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.156.264.885,- atau 93,22 % terdapat efisiensi sebesar 1,4 %. Sasaran pertama, Meningkatnya Koperasi Aktif pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 191.534.240,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.438.500,- atau 99,42 % terdapat efisiensi sebesar 0,79 %. Sasaran kedua, Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro didukung anggaran sebesar Rp. 1.737.187.171,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.649.929.900,- atau 95 % terdapat efisiensi sebesar 1,27 %. Sasaran ketiga,

Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja didukung anggaran sebesar Rp. 1.664.981.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.613.602.135,- atau 96,91 % terdapat efisiensi sebesar 1,05 %. Sasaran keempat, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan didukung anggaran sebesar Rp. 72.977.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.077.830,- atau 98,76 % terdapat efisiensi sebesar 1,01 %. Sasaran kelima, Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan didukung anggaran sebesar Rp. 6.737.116.020,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.038.832.306,- atau 89,63 % terdapat efisiensi sebesar 1,09 %. Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Reallisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN								
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmitgrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	1,18 %	1,40 %	118 %	191.534.240	190.438.500	99,42 %	1,18 %
		4,66 %	9,7%	207%	1664.981.120	1613.602.135	96,91 %	2,13 %
		52,61 %	51,52 %	98 %	1.664.981.120	1.613.602.135	96,91 %	1.01 %
		100 %	100 %	100 %	72.977.830	72.077.830	98,76 %	1.01 %

SASARAN								
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	237,65 %	187,97 %	79,09 %	191.534.240	190.438.500	99,42 %	0,79 %
2	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	9,32 %	11,28 %	121 %	1.737.187.171	1.649.929.900	95 %	1,27 %
3	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	70,89 %	72,15 %	102 %	1.664.981.120	1.613.602.135	96,91 %	1,05 %
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	100 %	100 %	100 %	72.977.830	72.077.830	98,76	1,01 %
5	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	65 %	63,65 %	97,92 %	6.737.116.020	6.038.832.306	89,63 %	1,09 %
		87,99 %	86,87 %	98,72 %				

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kinerja Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan diwujudkan melalui pencapaian 6 (enam) indikator sasaran, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Pada tujuan pertama diwujudkan dengan 5 (lima) sasaran yang mempunyai 6 (enam) indikator sasaran, yaitu sasaran pertama Persentase Koperasi Aktif memiliki tingkat capaian sebesar 79,09 % sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 98,73 %. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 80,10 %, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi/ Tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.

Indikator sasaran kedua Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro memiliki tingkat capaian sebesar 121 % sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 98,89 %. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 122 %, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dan Program Pengembangan UMKM.

Indikator sasaran ketiga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki tingkat capaian sebesar 102 % sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 96,91 %. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 105 %, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Dan Program Hubungan Industrial;

Indikator sasaran keempat Presentase transmigran yang diberangkatkan memiliki tingkat capaian sebesar 100 % sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 100 %. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 100 %, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

Indikator sasaran kelima Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Nilai IKM Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian sebesar 98,34 % sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 89,63 %. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 91,14 %, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.9
Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	118 %				
		Rasio Kewirausahaan Daerah	207%				
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	98 %				
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100 %				
1.1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	79,09 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	97,53 %	Menunjang
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	97,53 %	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	99,93 %	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Unit Usaha yang	99,93 %	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
1.2	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	121 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	98,30 %	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	98,30 %	
				PROGRAM PENGEMBANGAN	persentase pelaku usaha	99,48 %	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				UMKM	mikro yang dibina yang meningkat omsetnya		
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	99,48 %	
1.3	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	102 %	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	99,46 %	Menunjang
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	99,46 %	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	96,91 %	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	96,85 %	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	99,99 %	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	99,99 %	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	99,72 %	Menunjang
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	99,69 %	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 %	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	91,56 %	Menunjang
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	100 %	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	90,94 %	
1.4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %	Menunjang
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	100 %	
1.5	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	97,92 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	89,55 %	Menunjang
		Nilai IKM Perangkat Daerah	98,72 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
				Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima	88,32 %	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48,69 %	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96,70 %	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	91,50 %	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	97,19 %	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

3.2 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	42.586.700	41.538.000	97,53
	Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	42.586.700	41.538.000	97,53
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	857.947.540	857.400.500	99,93

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	Kegiatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	857.947.540	857.400.500	99,93
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.737.187.171	1.707.650.914	98,30
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	678.554.800	650.044.800	95,79
		177.469.700	177.326.700	99,91
		534.774.500	533.893.200	99,83
		346.388.171	346.386.214	99,99
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	415.102.150	412.971.950	99,48
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	283.555.200	281.425.000	99,24
		131.546.950	131.546.950	100
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	23.564.500	23.437.500	99,46
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	23.564.500	23.437.500	99,46
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.664.981.120	1.613.602.135	96,91
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.618.600.000	1.567.521.985	96,84
		15.540.150	15.240.150	98,06
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.533.080	10.532.200	99,99
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	20.307.890	20.307.800	99,99
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.537.120	99.259.700	99,72
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25.000.000	25.000.000	100
		67.078.320	66.800.900	99,58
	Kegiatan Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	7.458.800	7.458.800	100

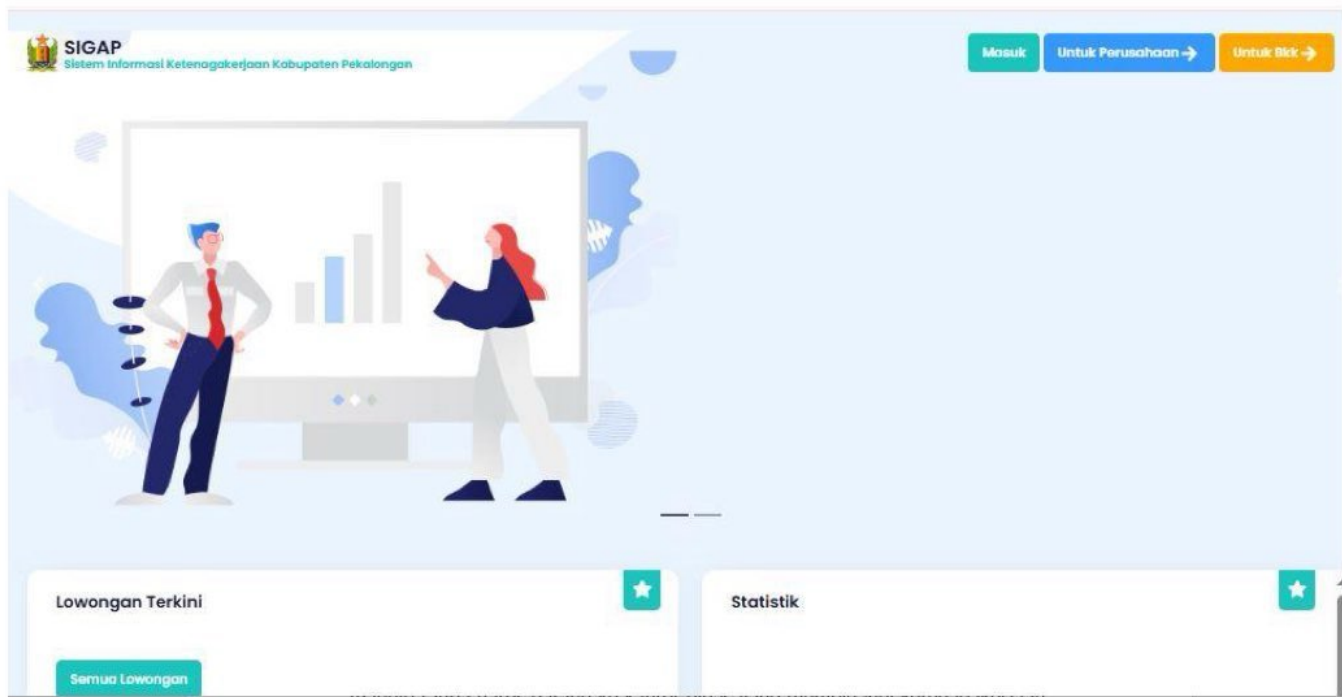
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	316.145.650	289.494.050	91,56
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.082.450	10.082.450	100
		11.827.000	11.827.000	100
	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	113.447.200	113.097.200	99,69
		10.789.000	10.789.000	100
		170.000.000	143.698.400	84,52
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	72.977.830	72.077.830	98,76
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.977.830	72.077.830	98,76
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.737.116.020	6.033.219.206	89,55
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.613.160	5.613.100	99,99
		5.321.700	5.321.700	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.789.846.000	4.222.047.028	88,14
		83.956.880	82.920.000	98,76
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.518.000	2.200.000	48,69
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.994.000	9.994.000	100
		53.518.840	52.318.700	97,75
		30.000.000	29.249.360	97,49
		74.648.800	71.548.800	95,84
		5.791.440	5.791.200	99,99
		41.652.600	39.492.069	94,81
		3.275.520	3.275.520	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.625.000	182.633.468	97,86
		1.117.000.000	1.010.210.348	90,43
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.995.200	33.265.500	95,05
		59.997.400	55.893.113	93,15
		54.961.480	53.729.400	97,75
		175.400.000	173.329.000	98,81

3.3 INOVASI

Penerapan Aplikasi SIGAP guna menunjang pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1). Dengan menggunakan Aplikasi SIGAP memudahkan para pencari kerja untuk membuat dan mencetak Kartu Pencari Kerja (AK1) secara mandiri tanpa harus datang ke kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Gambar 3.1

SIGAP (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata – rata capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 94,81 % tercapai dengan kategori Baik, yang terdiri dari indikator tujuan sebanyak 4 (empat) dan indikator sasaran sebanyak 6 (enam) adapun indikator yang tercapai dalam kategori “Istimewa” yaitu Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dan Rasio Kewirausahaan Daerah, sedangkan indikator Rasio Produktivitas Tenaga Kerja dan Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan tercapai dalam kategori “baik”.
2. Faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain: adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan implemenasinya, pelaksanaan koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya kolaborasi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
3. Anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebanyak **Rp. 11.967.145.801,-** dengan **realisasi** sebesar **Rp 11.156.264.885,-** atau 93,22 % terdapat efisiensi sebesar **1,01%.**
4. Kinerja Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM; Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mampu mewujudkan Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada sekretariat untuk menambahkan SDM yang berkompeten
2. Pada bidang Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk menyelesaikan target kinerja Program dan Kegiatan sesuai urusan bidang masing-masing.
3. Bagian – bagian meningkatkan pelaksanaan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan yang dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja terdapat 1 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, sehingga perlu dilaksanakan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengisi formasi yang kosong. Selain itu Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdapat 1 jabatan kepala bidang yang kosong, Sekretariat Dinas juga terdapat 1 Jabatan Kosong pada sub perencanaan dan keuangan sehingga perlu diisi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Pekalongan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Bupati Pekalongan



Dr. FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	TUJUAN : Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,18	%
		Rasio Kewirausahaan Daerah	4,66	%
		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	52,61	Rasio
		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100	%
2.	SASARAN :			
	1. Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65	%
	2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32	%
	3. Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89	%
	4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100	%
	5. Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65	%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,99	%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	42.586.700	APBD
2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp.	857.947.540	APBD
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp.	1.737.187.171	APBD
4	Program Pengembangan Umkm	Rp.	415.102.150	APBD
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	23.564.500	APBD
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.664.981.120	APBD
7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	99.537.120	APBD
8	Program Hubungan Industrial	Rp.	316.145.650	APBD
9	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.	72.977.830	APBD
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.737.116.020	APBD

Kajen, / Oktober 2025



Pihak Kedua,
Bupati Pekalongan

Dr. FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 19690208 1994 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65	%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	87,99	%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.737.116.020	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.934.860	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.799.427.880	APBD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.518.000	APBD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 246.460.560	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.480.000.000	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 699.658.700	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
 Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
 Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
 Kabupaten Pekalongan

[Handwritten signature]

WIDODO, S.H., M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP : 19690208 1994 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DHODHI KURNIAWAN, S.H.

Jabatan : Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I

NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,

Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan

DHODHI KURNIAWAN, S.H.
Penata (III/c)

NIP : 19800915 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Paket
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.613.160	APBD
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.789.846.000	APBD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 83.956.880	APBD
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 53.518.840	APBD
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 74.648.800	APBD
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 5.791.440	APBD
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 41.652.600	APBD

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 186.625.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 54.961.480	APBD
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 175.400.000	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025



Pihak Kedua,
Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I

NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan

DHODHI KURNIAWAN, S.H.
Penata (III/c)

NIP : 19800915 201502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WULUNGSARI MEDYARINI, S.E.

Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinkop
UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan



WULUNGSARI MEDYARINI, S.E.
Penata Tk I (III/d)
NIP : 197608282011012009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	Orang
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.321.700	APBD
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 4.518.000	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.994.000	APBD
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 30.000.000	APBD
5	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 3.275.520	APBD
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.117.000.000	APBD

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 34.995.200	APBD
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 59.997.400	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

Pihak Pertama,
Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I

NIP : 19690208 1994 1 006

WULUNGSARI MEDYARINI, S.E.
Penata Tk I (III/d)

NIP : 197608282011012009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IDAYANTI FADILAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I

NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM dan
Naker Kabupaten Pekalongan

IDAYANTI FADILAH, S.IP.
Pembina (IV/a)

NIP : 196912181994032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KOPERASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	237,65	%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 42.586.700	APBD
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 42.586.700	APBD
2.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 857.947.540	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 857.947.540	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
 Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM dan
 Naker Kabupaten Pekalongan

IDAYANTI FADILAH, S.IP.
 Pembina (IV/a)
 NIP : 196912181994032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROUFAH AINANI S. S.Pt.MP

Jabatan : Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM dan
Naker Kabupaten Pekalongan

ROUFAH AINANI S. S.Pt.MP.
Penata Tk I (III/d)
NIP : 197708272010012008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG UMKM
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	9,32	%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.737.187.171	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 1.737.187.171	APBD
2.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 415.102.150	APBD
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp. 415.102.150	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
 Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang UMKM Dinkop UKM dan
 Naker Kabupaten Pekalongan

ROUFAH AINANI S. S.Pt.MP.
 Penata Tk I (III/d)
 NIP : 197708272010012008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYANTO, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

TRI HARYANTO, S.H., M.M.
Penata Tk I (III/d)
NIP : 197708272010012008

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,89	%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100	%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 23.564.500	APBD
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 23.564.500	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.664.981.120	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 1.634.140.150	APBD
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 10.533.080	APBD
	Kegiatan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil	Rp. 20.307.890	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 99.537.120	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 92.078.320	APBD
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.458.800	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 316.145.650	APBD
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.909.450	APBD

Kegiatan Pencegahan Dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja Dan
Penutupan Perusahaan Di Daerah
Kabupaten/Kota

Rp.

294.236.200 APBD

5. Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

Rp.

72.977.830 APBD

Kegiatan Penataan Persebaran
Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Rp.

72.977.830 APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

TRI HARYANTO, S.H., M.M.
Penata Tk I (III/d)
NIP : 197708272010012008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUS SAJIDIN, S.T.

Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : WIDODO, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala UPTD BLK
Kabupaten Pekalongan



Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

KHOIRUS SAJIDIN, S.T.
Penata Tingkat I /III.d
NIP : 19760906 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288	Orang

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 1.618.600.000	APBD

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
 Plt. Kepala Dinkop UKM dan Naker
 Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP : 19690208 1994 1 006

Pihak Pertama,
 Kepala UPTD BLK
 Kabupaten Pekalongan

KHOIRUS SAJIDIN, S.T.
 Penata Tingkat I /III.d
 NIP : 19760906 200501 1 009